

# MODEL DAKWAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA

*Sudarno Shobron*

Dosen Pemikiran Islam Kontemporer Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Surakarta 57102

E-Mail: [sudharno\\_shobron@ums.ac.id](mailto:sudharno_shobron@ums.ac.id) / [sudarnoshobron@gmail.com](mailto:sudarnoshobron@gmail.com) /  
[d4rno561@yahoo.com](mailto:d4rno561@yahoo.com)

**Abstract:** *The existence of Transnational Islam Movement, Hizbut Tahrir, to Indonesia adds the number of Islam movement conveying dakwah (missionary endeavor) asking to do the good deed and avoiding bad ones. Each organization has its different strategy and model though it is possible that there is similarity. Hizbut Tahrir came to Indonesia in 1983 by offering radical changing agenda, that is, changing the Indonesian political system to Khilafah al-Islamiyah.*

*The Islamic political system gets appreciation from a number of Islamic people who want changes. There are two dakwah strategies, that is, cultural and structural. The cultural is by changing the awareness of the society about the importance of changes in Indonesia with only one way that is establishing political system Khilafah al-Islamiyah. Structural strategy is carried out by forming opinion for Islamic people and people through rallies and khilafah conferences. The way to make the awareness of Islamic people is by dakwah.*

*The Hizbut Tahrir missionary endeavor follows the Prophet Muhammad (peace be upon him) in making changes in Mecca and Medina through three phases, that is development of cadres, interaction to society and authority.*

**Abstrak:** *Kehadiran gerakan Islam transnasional, Hizbut Tahrir, ke Indonesia menambah jumlah gerakan Islam yang melakukan dakwah amar makruf nahi munkar. Masing-masing organisasi memiliki strategi dan model dakwah yang berbeda-beda walaupun tidak menutup kemungkinan ada persamaannya. Hizbut Tahrir datang ke Indonesia pada tahun 1983 dengan menawarkan agenda perubahan yang radikal, yakni merubah sistem politik Indonesia dengan sistem Khilafah al-Islamiyah.*

*Sistem politik Islam tersebut mendapat apresiasi dari sebagian umat Islam yang menginginkan perubahan. Strategi dakwah yang dilakukan ada dua, yakni kultural dan struktural. Kultural dengan merubah kesadaran umat Islam akan pentingnya perubahan Indonesia, satu-satunya adalah dengan menegakkan sistem politik Khilafah al-Islamiyah. Strategi struktural yang dilakukan dengan membentuk opini publik umat Islam dan rakyat Indonesia melalui demonstrasi-demonstrasi, konferensi khilafah. Jalan yang diambil agar kesadaran umat Islam itu terbentuk adalah dengan dakwah.*

*Model dakwah Hizbut Tahrir mengikuti cara Rasulullah saw dalam melakukan perubahan di Mekkah dan Madinah dengan tiga tahap, yakni tahap pembinaan dan perkaderan, tahap berinteraksi dengan masyarakat, dan tahap penerimaan kekuasaan.*

**Kata Kunci:** *khilafah al-Islamiyah; kultural dan struktural; perubahan radikal.*

## PENDAHULUAN

Gerakan reformasi di Indonesia telah memasuki usia ke 16 tahun (1998-2014), respon masyarakat luas terhadap gerakan ini sangat bervariasi, bahkan tidak lepas dari kritik terhadap jalannya reformasi. Akhir-akhir ini ada yang mengidolakan kembali lahirnya kembali Orde Baru, karena kehidupan di masa itu dirasa lebih baik dibandingkan saat ini yang serba mahal, serba tidak aman, serba susah, dan serba banyaknya bencana. Kerinduan masyarakat terhadap kehidupan masa Orde Baru ditangkap oleh para politisi untuk mendirikan partai politik, memberikan janji-janji politik dan menebarkan halusinasi kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat dengan merujuk pada konstitusi UUD 1945. Pemilihan legislatif (pileg) yang telah berlangsung pada tanggal 9 April 2014 yang lalu, para calon anggota legislatif (caleg) menawarkan janji-janji kepada konstituennya bahwa kalau terpilih menjadi anggota dewan akan memberikan kemakmuran rakyat, kemiskinan akan terkikis, pengangguran akan terkurangi dan yang lebih bergairah adalah akan memberantas korupsi, bahkan berjanji akan menggratiskan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan menurunkan harga-harga kebutuhan pokok.

Salah satu yang dirasakan pada era reformasi adalah maraknya semangat berdemokrasi yang memberikan ruang kebebasan untuk mengekspresikan pikiran dalam bentuk tindakan yang terorganisir, maka lahirlah partai-partai politik dengan berbagai macam azasnya, organisasi massa (ormas) dengan berbagai macam orientasi,

dan lembaga swadaya masyarakat ataupun *civil society* dengan berbagai macam kepentingannya. Demokrasi sebagai ideologi dan sistem politik telah menarik perhatian banyak pihak, sehingga dengan demokrasi itulah diharapkan dapat memperbaiki sistem kehidupan.

Demokrasi menjamin keberlangsungan *civil society* sebagai penyeimbang kekuasaan, dan sebagai agen perubahan ke arah kehidupan yang lebih mapan. Muncullah berbagai macam *civil society* yang menawarkan perubahan-perubahan, salah satunya adalah Hizbut Tahrir (HT). Gerakan Islam transnasional ini menawarkan perubahan sistem politik yang lebih radikal, karena akan merubah sistem politik Indonesia ke sistem politik *Khilafah Islamiyah*, bentuk Negara republik diganti dengan *daulah Islamiyah*. Sistem politik di Negara-negara Islam dan muslim khususnya dan Negara non Islam pada umumnya menerapkan sistem demokrasi model Barat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan sistem politik demokrasi oleh HT merupakan sistem kufur.<sup>1</sup> Adapun strategi yang digunakan untuk melakukan perubahan adalah dengan dakwah, maka HTI telah memiliki model dakwah yang dianggap efektif dan efisiensi. Oleh karena itu yang menjadi pokok masalah adalah “bagaimana model dakwah Hizbut Tahrir Indonesia”?.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam rangka untuk menemukan esensi dari setiap fenomena.<sup>2</sup> Salah satu strategi penelitian kualitatif yang dikembangkan

---

<sup>1</sup>Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur*, terj.: M.Shidiq al-Jawi, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009).

<sup>2</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 36-37.

adalah studi kasus.<sup>3</sup> Oleh Noeng Muhadjir yang dimaksud studi kasus adalah “menemukan kebenaran ilmiah secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama untuk menemukan kecenderungan, pola, arah dan interaksi banyak faktor yang dapat memacu atau menghambat perubahan”.<sup>4</sup> Studi kasus sangat bermanfaat untuk memahami suatu kasus secara komprehensif dan untuk mengetahui prospeknya di masa depan. Istilah yang digunakan oleh McGow dan Watson yang dikutip oleh Mohtar Mas’oed adalah *scientific method*, yakni menganalisis data secara obyektif, logis dan sistematis untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan yang dapat diamati.<sup>5</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis (*historical approach*)<sup>6</sup> adalah penelitian yang berusaha melihat sejarah masa lampau secara kritis dan kronologis. Pendekatan historis menurut Teuku Ibrahim Alfian,<sup>7</sup> bertumpu pada empat kegiatan pokok yaitu (1) pengumpulan obyek yang berasal dari zaman

itu dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis dan lisan yang relevan; (2) menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik; (3) mengumpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik; (4) menyusun kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti. Proses kerja pendekatan historis dalam penelitian ini adalah *heuristik* (mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah), *critics* (menilai otentisitas dan kredibilitas tidaknya suatu sumber), *auffassung* (sintesis fakta yang diperoleh melalui kritik sumber), dan *darstellung* (penyajian dalam bentuk tertulis). Pendekatan historis ini digunakan untuk meneliti model dakwah HTI yang telah diterapkan untuk melakukan perubahan-perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Teknik pengumpulan datanya dengan dokumentasi,<sup>8</sup> berupa buku-buku,<sup>9</sup> buletin (*Al-Islam*), majalah (*al-Wa’ie*), tabloid Media Umat, maupun pernyataan resmi organisasi. Analisis data menggunakan *verstehen*<sup>10</sup>

<sup>3</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1996), hlm. 4.

<sup>4</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 38.

<sup>5</sup> Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 79.

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng, 1995), hlm. 17. Periksa juga, Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 1.

<sup>7</sup> Teuku Ibrahim Alfian, *Metode dan Metodologi Sejarah*, makalah, [t.th.], hlm.1-2.

<sup>8</sup> Sartono Kartodirdjo, “Metode Penggunaan Bahan Dokumen”, dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 45. Lebih jauh Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa bahan-bahan dokumen itu meliputi (1) otobiografi; (2) surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memoar; (3) surat kabar; (4) dokumen-dokumen pemerintah; (5) cerita roman dan cerita rakyat.

<sup>9</sup> Buku-buku resmi yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir antara lain: (1) مفاهيم حزب التحرير (2) مفاهيم أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة (6) نظام الإسلام (5) الدولة الإسلامية (4) التكتل الحزبي (3) سياسة لحزب التحرير

<sup>10</sup> George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 126. Lebih jauh dijelaskan bahwa “ketika kita sadar bahwa metode historis tidak lain adalah metode interpretasi klasik yang diterapkan pada tindakan-tindakan ketimbang pada teks, metode yang bertujuan mengidentifikasi desain manusia, “makna” di balik peristiwa-peristiwa yang dapat diamati, maka kita tidak akan kesulitan untuk menerima bahwa metode inipun dapat diterapkan pada interaksi manusia sebagaimana pada aktor individu. Dari sudut pandang ini seluruh sejarah adalah interaksi, yang harus ditafsirkan sebagai rencana lain dari berbagai aktor.

yaitu mengungkapkan motif-motif dan pemikiran-pemikiran yang ada di balik suatu tindakan.<sup>11</sup> *Verstehen* memiliki dua cara kerja yakni *pertama*, mengidentifikasi pemahaman tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh sang aktor; dan *kedua*, mengenali konteks yang melingkupinya dan yang digunakan untuk memahaminya,<sup>12</sup> atau interaksionisme simbolik<sup>13</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hizbut Tahrir حزب التحرير – *Party of Liberation*) didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina. Organisasi ini menahbiskan dirinya sebagai gerakan politik (*political movement – الحركة السياسية*) yang bertujuan membebaskan Islam dari kekuasaan kafir dan ingin membangun kembali sistem *khilâfah al-Islâmiyyah*.<sup>14</sup> Namun gerakan Hizbut Tahrir yang akan membangun kembali sistem *khilâfah al-Islâmiyyah* itu tidak berada dalam ruang hampa, tetapi dalam ruang (negara) yang telah memiliki sistem dan ideologi

besar dunia yang memainkan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni demokrasi, kapitalisme<sup>15</sup> dan sosialisme,<sup>16</sup> sehingga kemungkinan terjadinya konflik ideologi tidak dapat dihindari.

Walaupun demikian, Hizbut Tahrir (HT) dapat berkembang di beberapa Negara. Sampai dengan tahun 2013, HT telah berdiri di 48 (empat puluh delapan) negara, baik di negara Islam/Muslim (Kazaktan, Uzbekistan, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Aljazair, Libya, Iran, Irak, Malaysia dan Indonesia), maupun negara sekuler (Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Kanada, dan Amerika Serikat). Semua Negara ini telah menganut sistem politik demokrasi yang di dalamnya hidup subur kapitalisme. Namun sistem politik demokrasi tersebut ditolak HT bahkan dikatakan sistem kufur,<sup>17</sup> dengan alasan *pertama*, kedaulatan mutlak milik *syara'*, bukan milik rakyat; *kedua*, demokrasi adalah sistem kapitalisme murni; *ketiga*, *al-Hakim* adalah Allah, bukan manusia; dan *keempat*, kebenaran bukan ditentukan suara mayoritas.<sup>18</sup>

<sup>11</sup>Robert Bodgan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 45.

<sup>12</sup>George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi...*, hlm. 127.

<sup>13</sup>Mariasusai Dhavamoni, *Phenomenologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 46.

<sup>14</sup>Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Afif dan Nur Khalish, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), hlm. 4-5.

<sup>15</sup>Kapitalisme adalah suatu bentuk produksi yang dibatasi oleh suatu struktur dasar yang spesifik, mengenai hubungan-hubungan produksi yang melibatkan dua kelas, pemeras dan yang diperas. Lihat, Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, terj.: Joebaar Ajoeb, (Jakarta: TePLOK Press, 2000), hlm. 23. Lihat juga, Khandakar Elahi dan Constantine P Danopoulos, "Democracy, Capitalism and Development", dalam *Journal of Security Sector Management*, Volume 2 Number 2-June 2004, hlm. 7. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dalam kapitalisme ada prinsip kompetisi produksi dan ada kesamaan bagi para pelaku ekonomi.

<sup>16</sup>Sosialisme adalah "any of various theories or system of social organization in which the means of producing and distributing goods is owned collectively or by a centralized government that often plans and control the economy" (sosialisme adalah bermacam-macam teori atau sistem organisasi sosial dimana alat-alat produksi dan distribusi milik bersama – kolektif – atau pemerintah pusat yang merencanakan dan mengatur ekonomi. Lihat <http://www.blackcrayon.com>.

<sup>17</sup>Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur...*, hlm. 1.

<sup>18</sup>M. Abdul Majid al-Khalidi, *Analisis Dialektik Kaidah Pokok Sistem Pemerintah Islam*, terj. Harits Abu Ulya, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), hlm. 58.

Eksistensi HT di beberapa negara Islam/muslim mengalami kendala yang cukup berarti. Di Yordania sewaktu HT didaftarkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani kepada pemerintah untuk diakui sebagai organisasi politik tidak mendapatkan ijin, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dinyatakan ilegal. HT juga dilarang mengadakan kegiatan di Bangladesh, karena diduga melakukan tindakan kekerasan, dan dianggap teroris, sehingga 40 aktivisnya ditangkap pemerintah. Nasib serupa terjadi di Tunisia, pemuda-pemuda HT ditangkap pemerintah, karena melakukan kritik keras terhadap kebijakan politik pemerintah. Di Turki yang selama ini dinilai menjadi sebab runtuhnya kekhilafahan, HT tidak dapat bergerak leluasa, 200 aktivis ditangkap pemerintah, 80 di antaranya masuk penjara. Di Pakistan, 30 pemuda HT ditangkap, karena diduga terlibat dalam teroris.<sup>19</sup> Semua kasus ini menandakan bahwa ada problem serius mengiringi keberadaan HT di negara-negara Islam, sehingga menjadi kendala tersendiri dalam mewujudkan *khilâfah al-Islâmiyyah* yang selama ini menjadi inti perjuangannya.<sup>20</sup> Hal ini berbeda dengan di Indonesia yang disebut negara muslim, dengan Pancasila sebagai ideologi negara, keberadaan HT sejak kedatangannya sampai sekarang (selama 28 tahun) tidak mengalami problem perjuangan karena belum

pernah terjadi penangkapan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah. Konflik fisik dengan sesama anggota gerakan Islam lainnya juga belum pernah terjadi, bahkan perkembangan HTI cukup berhasil dengan berdirinya 33 pengurus tingkat wilayah dan 300 tingkat daerah.

HTI sebagai gerakan Islam transnasional<sup>21</sup> masuk ke Indonesia pada tahun 1983, dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubaligh sekaligus aktivis Hizbut Tahrir dari Australia yang berasal dari Yordania. Abdurrahman datang ke Bogor untuk mengajar di Pondok Pesantren al-Ghazali, kemudian Masjid al-Ghifari IPB dijadikan sebagai tempat penyemaian ide-ide HT kepada mahasiswa. Mahasiswa yang telah menerima dakwah tentang seluk beluk HT, memiliki tugas memperkenalkan HT kepada aktivis mahasiswa lain di luar perguruan tingginya yang aktif di Lembaga Dakwah Kampus (LDK), misalnya Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Erlangga, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan lain-lain.<sup>22</sup> LDK yang dihuni oleh sebagian mahasiswa yang telah menerima ideologi HT, secara kelembagaan berkembang menjadi Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada

---

<sup>19</sup> Lihat, dalam <http://www.hizbut-tahrir.or.id>

<sup>20</sup> Untuk mengetahui lebih lanjut keberadaan HT di beberapa negara Islam, yakni di Yordania, Palestina, Irak, Suriah, Lebanon, Kuwait, Mesir, Tunisia, Libya, dapat dilihat dalam Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqafah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, terj. Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa, (Bangil: Al-Izzah, 2008), hlm. 113-146.

<sup>21</sup> Islam transnasional adalah aliran Islam yang berasal dari luar negeri yang memiliki orientasi gerakan politik dan dakwah masuk ke Indonesia untuk mengembangkan gerakannya itu, misalnya Ikhwanul Muslimin, Jama'ah Tabligh, Jama'ah Islamiyah, Gerakan Salafi. Lihat, Abu Za'ur, *Seputar Gerakan Islam*, terj. Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).

<sup>22</sup> Majalah *Sabili*, No.9 Th. X, *Edisi Khusus Sejarah Emas Muslim Indonesia*, 2003, hlm. 142-143. Lihat, Zeyno Baran (ed.), *The Challenge of Hizbut Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology, Conference Report*, ([t.t]: The Nixon Center, 2004), hlm. 11.

tahun 1986.<sup>23</sup> Muhammad Ismail Yusanto, aktivis Jama'ah Shalahuddin Universitas Gadjah Mada, menjadi salah satu pendiri forum ini, dan forum tersebut menjadi cikal-bakal perkembangan HTI.

Kehadiran HT yang membawa ide, gagasan, dan sistem politik Islam sesuai dengan suasana batin mahasiswa yang sedang mencari solusi dari problem keumatan dan kebangsaan dalam dimensi politik. Secara sosial-politik, umat Islam selalu terpinggirkan sehingga tidak memegang peran-peran strategis dalam pemerintahan. Pemerintah pada saat itu memiliki kiat untuk menjinakkan umat Islam, yakni dengan cara menciptakan rasa takut kalau berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Peristiwa Tanjung Priok, pemberlakuan asas tunggal Pancasila untuk semua organisasi massa dan politik, pengebirian kebebasan kampus dengan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), menjadi faktor kebangkitan semangat mahasiswa dalam melakukan gerakan-gerakan. Semangat dakwah, jihad, ijtihad dan pentingnya pemerintahan yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah yang ditawarkan oleh HT menjadi tema menarik bagi mahasiswa. HT datang pada saat yang tepat, dan ide-ide yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan dianggap sesuai kebutuhan pada saat itu, sehingga mudah berkembang ke hampir semua kampus besar di Indonesia.<sup>24</sup> Apalagi tema tentang *ad-Daulah al-Islâmiyyah*

(Negara Islam) yang pernah menjadi cita-cita sebagian umat Islam Indonesia, dengan gagasan Negara Islam Indonesia (NII),<sup>25</sup> dinilai sebagai bentuk pengamalan Islam yang *kâffah*, karena sebagian umat Islam berpendapat bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Bahkan bentuk kesultanan Islam di Nusantara (sebelum Indonesia Merdeka) yang telah ada di Indonesia, dan diyakini memiliki hubungan dengan kekhalifahan pada masa Abbasiyah.<sup>26</sup>

## DUA SAYAP: DAKWAH DAN POLITIK

Dilihat dari orientasi gerakan organisasi Islam di Indonesia sangat beragam sesuai dengan corak pemikiran para pendiri atau penggeraknya dalam memahami ajaran Islam, sehingga dapat dipilah menjadi tiga orientasi gerakan, yakni:

1. Orientasi murni dakwah amar makruf nahi munkar. Artinya, gerakan ini hanya berorientasi dakwah saja, tidak tertarik ke politik praktis. Orientasi ini sungguh mulia, karena membangun masyarakat ke arah yang lebih baik dengan melalui perbaikan, perubahan, dan melakukan transformasi sesuai kondisi obyektif masyarakat yang menerima dakwah. Kondisi kemiskinan harta benda, ilmu, etika dan kemiskinan orientasi masa depan, dari waktu ke waktu tidak berkurang melainkan terus bertambah. Dalam teori sosiologi pem-

<sup>23</sup> Feriawan A.N., FSLDK Berhenti Berharap?, dalam *Special Report, Digital Journal Al-Manar*, Edisi 1/ 2004. Lihat juga, Redaksi, "Wawancara dengan Ismail Yusanto", dalam *Special Report Digital Journal Al-Manar*, Edisi 1/ 2004.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Negara Islam Indonesia (NII) dideklarasikan oleh Kartosuwiryo di Cianjur Jawa Barat pada tahun 1949, kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain seperti Aceh dan Sulawesi Selatan melalui Persiapan Penegakkan Syariat Islam (KPPSI) yang dipimpin oleh Kahar Muzakir. Lihat, Taufik Adnan Amal dan Syamsul Rizal Penggabean, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Alfabeta, 2004), hlm. 83.

<sup>26</sup> Anonim, *Khilafah dan Jejak Islam Kesultanan Islam Nusantara*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009).

bangunan disebut pembangunan dari bawah yakni membangun rakyat menjadi manusia seutuhnya, lahir batin, dunia akhirat.

Gerakan Islam yang berorientasi dakwah tidak memiliki kesamaan dalam strategi dan metode berdakwah. Ada yang menggunakan metode kekerasan, ada yang dengan lemah lembut dari rumah ke rumah, ada yang dengan kebijakan, memberikan nasehat yang baik dan melakukan dialog keagamaan.

2. Orientasi murni politik. Artinya gerakan ini mengambil jalur politik struktural, melalui politik kekuasaan, dengan mendirikan partai politik yang bercirikan Islam, dan gerakan politik non-parlemen. Gerakan Islam yang berada dalam orientasi ini hanya dengan politiklah Islam dapat ditegakkan, karena kalau gerakan Islam telah berkuasa dalam suatu negara, maka dengan mudah mengubah tatanan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam. *Din wa dauah* (agama dan negara) menjadi satu kesatuan integral, tidak dapat dipisahkan. Namun sayangnya, hampir semua gerakan Islam di dunia yang berorientasi politik yang kemudian disebut gerakan politik Islam, tidak selalu menang dalam perebutan kekuasaan melalui prosedur pemilihan umum. Gerakan Politik Islam di beberapa negara, misalnya di negara-negara Asia Tenggara (Thailand, Philipina, Vietnam, Malaysia, dan Burma) tidak pernah memegang kekuasaan. Ini suatu problem serius bagi gerakan politik Islam, walaupun jumlah umat Islam tergolong besar, sehingga tidak ada hubungan signifikan antara jumlah umat Islam dengan perolehan suara partai politik Islam.
3. Memiliki orientasi dakwah dan politik. Inilah yang disebut dua sayap, yakni sayap dakwah dan sayap politik. Ini da-

pat dimaknai bahwa dakwah untuk kepentingan politik, dan politik dijadikan payung untuk berdakwah. Makna yang pertama bahwa semua aktivitas dakwahnya memiliki kepentingan politik yang pada akhirnya dijadikan pijakan untuk meraih kekuasaan, bahkan keluhuran nilai-nilai zakat, infak, sadaqah yang dibagikan kepada mereka yang berhak menerima, mengandung kepentingan politik. Untuk itulah sering dijumpai dalam acara bakti sosial ke daerah-daerah bencana, ke desa-desa dan ke komunitas orang-orang lemah, bendera-bendera dan identitas partai politik selalu mendominasi, lucunya besarnya nominal dari anggaran bakti sosial lebih kecil dibandingkan dengan besarnya belanja untuk bendera dan atribut lainnya. Makna yang kedua, politik dijadikan payung untuk berdakwah, artinya kalau kekuasaan telah berada dalam genggamannya, maka dijadikan sebagai alat untuk berdakwah melalui jalur instruksi dan pembuatan undang-undang, peraturan daerah, surat keputusan yang memaksa orang untuk berislam dengan baik.

Orientasi dua sayap ini memang memiliki nilai positif dan negatifnya. Nilai positifnya sebagai bentuk perwujudan dari kesempurnaan Islam, yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dakwah dan politik tidak dapat dipisahkan, karena dalam dakwah juga perlu strategi, metode dan kekuasaan. Nilai negatifnya, dua sayap tersebut dapat mereduksi nilai luhur agama Islam itu sendiri, seolah-olah orientasinya hanya kekuasaan belaka, apalagi sering ditempuh berbagai macam cara untuk sekedar meraih kekuasaan, termasuk membeli suara secara langsung maupun melalui "broker politik" dengan nilai rupiah tertentu. *Money politics*

memang melanggar peraturan, tetapi jarang kasus ini dibawa ke meja hijau, lantas pelakunya baik yang memberi maupun yang menerima divonis bersalah oleh pengadilan.

Hampir semua partai politik yang berasaskan Islam dan atau memiliki basis massa Islam dalam panggung politik praktis, tidak pernah ada yang bersatu. Masing-masing memiliki agenda sendiri dan selalu mengatasmakan umat, program-program yang akan dilaksanakan juga untuk kepentingan umat Islam. Tetapi dalam realitas jarang mereka memperjuangkan umat Islam, yang diperjuangkan adalah diri sendiri dan komunitasnya. Tidak bersatunya partai politik Islam dan partai yang berbasis masa Islam pada saat ada helatan pemilukada, masing-masing mengusung calonnya sendiri, walaupun kadang secara kalkulasi politik tidak akan menang, tetapi bersikukuh untuk mencalonkan sendiri dengan pertimbangan menaikkan daya tawar partai dihadapan partai lain dan untuk menarik simpati konstituen.

Ironisnya, sesama partai Islam mengunggulkan calonnya sendiri dan melemahkan calon dari partai Islam lainnya, sehingga satu dengan yang lain selalu menaruh curiga. Tepatlah dalam adagium politik, tidak ada kawan sejati dan tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan bersama. Tidaklah heran dalam rangka kepentingan bersama, partai politik yang berbeda secara ideologis dapat bekerjasama dan berkoalisi untuk menggolkan pasangan calon gubernur/bupati/walikota. Contoh kongkrit pencalonan calon gubernur dan wakilnya pada daerah pemilihan Jawa Barat beberapa waktu yang lalu, calon gubernurnya dari PKS, wakilnya orang PDIP, tetapi pasangan calon ini kalah, yang

menang calon dari partai Golongan Karya. Logika linear mungkin tidak dapat menerima, bagaimana PKS dapat berkoalisi dengan PDIP. Itulah realitas politik yang harus dilihat dari logika loncatan. Peristiwa lain, kalau kepentingannya tidak terakomodasi, banyak para aktivis partai menyatakan keluar dari partai, dan mendeklarasikan partai politik baru yang diklaim sebagai partai Islam dengan mengajak teman-teman aktivis partai lain yang memiliki kepentingan bersama.

Oleh karena itu, orientasi dua sayap dari gerakan Islam tidak sungguh-sungguh ingin menegakkan dan menjunjung tinggi Islam sehingga terwujud masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan penuh kemakmuran. Sebaliknya, justru kepentingan pribadi dan komunitasnya yang diperjuangkan, sehingga sesama gerakan Islam yang memiliki orientasi sama tidak dapat dihindari terjadi gesekan-gesekan dalam melakukan kegiatan, sebagaimana yang pernah terjadi antara Muhammadiyah dan NU yang sama-sama berorientasi dakwah amar makruh nahi munkar, juga yang terjadi antara Muhammadiyah dengan PKS. Begitu juga HTI sebagai gerakan politik non-parlemen yang menjadikan dakwah sebagai strategi untuk meraih kekuasaan tidak dapat dihindari terjadinya konflik dengan gerakan Islam dan politik yang lain.

Menurut Karl Marx, suatu kelas benar-benar dapat eksis di tengah masyarakat luas hanya ketika ada kesadaran sedang berkonflik dengan kelas-kelas lain. Kalau tidak ada kesadaran ini kelas tersebut hanya eksis dalam dirinya sendiri, maka untuk menjadi kelas sebenarnya tidak dapat dihindari adanya konflik.<sup>27</sup> Apalagi kelas tersebut berada dalam masyarakat yang

<sup>27</sup>George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj. Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm.65.



pluralistik atau multikulturalistik memiliki potensi konflik yang tinggi karena ada kompetisi di antara mereka untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi kepentingannya.<sup>28</sup>

Tujuh belas ormas di atas, ada 10 ormas yang murni orientasinya dakwah, ada 3 ormas yang murni orientasinya politik, ada 4 ormas yang memiliki dua sayap. HTI walaupun sejak awal murni berorientasi politik dalam gerakannya, tetapi dalam prakteknya menggunakan dakwah sebagai strategi politik untuk meraih kekuasaan.

### MODEL DAKWAH HTI

Salah satu tujuan HTI yakni mendirikan *ad-daulah al-Islâmiyyah* dengan sistem *khilâfah* adalah agar memudahkan melakukan dakwah amar makruf nahi munkar. Dakwah yang dilakukan oleh penguasa akan lebih efektif dibandingkan oleh yang tidak memiliki kekuasaan. Penguasa memiliki *power* dapat menyusun undang-undang atau *dustûr* atau *qanûn* dapat disusun berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, bahkan syariat Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Apalagi dalam setiap hukum akan disertai dengan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi-nya. Ini merupakan kesempatan untuk dapat melaksanakan ajaran Islam secara *kâffah* dan mendakwahkan ke seluruh dunia.

HTI mengikuti metode dakwah Rasulullah saw, karena beliau adalah contoh teladan yang baik (Q.S. al-Ahzab/33: 21). HTI menerapkan operasionalisasi dakwah Rasulullah saw yang dibagi dalam tiga

tahap, yakni:

1. Tahap *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan). Pada tahap ini, dakwah dilakukan dengan mengundang orang-orang datang ke rumah, dan pada saat lain Rasulullah mendatangi orang-orang ke rumah, mengajak mereka masuk Islam, membangun keimanan dan pemahaman akan makna kalimah tahlil.
2. Tahap *tafa'ul* (berinteraksi) dengan umat, agar umat melaksanakan ajaran Islam dengan baik dalam kehidupannya. Pada tahap ini ada perjuangan politik, karena berhadapan dengan pemimpin kafir quraisy yang secara sosiologis telah mapan dalam masyarakat, dan secara teologis telah memiliki keyakinan sen-diri. Dakwah dalam tahap kedua penuh dengan perjuangan, dan dinamika, karena tidak mudah merubah masyarakat yang terbelenggu oleh kekuasaan dan keyakinan tradisional untuk dirubah menjadi orang yang beriman ke-pada satu Tuhan, Allah swt.
3. Tahap *istilamu al-hukmi* (penerimaan kekuasaan), untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh serta mendakwahkan risalah Islamiyah ke seluruh dunia.<sup>29</sup>

Tahapan dakwah ini oleh HTI juga diterapkan dalam tahapan untuk meraih kekuasaan. Namun sebelum kekuasaan dapat diraih, haruslah didirikan partai politik yang benar, yakni dengan menempuh delapan belas langkah untuk mendirikan partai ideologis dalam meraih kekuasaan.

---

<sup>28</sup>J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 97.

<sup>29</sup>Syabab Hizbut Tahrir, *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*, terj.: M.Ramdhan Adi, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), hlm. 118-130. Lihat juga Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), hlm.42-43.

Dakwah yang dilakukan HT adalah untuk meraih kekuasaan, maka dakwah hanya sebagai cara atau strategi politik.

Tiga tahap dakwah Rasulullah di atas dijadikan sebagai strategi juga untuk meraih kekuasaan di Indonesia, yakni:

1. **Marhalah pertama adalah مرحلة الدراسة والتعليم لإيجاد الثقافة الحزبية<sup>30</sup> yakni tahap pengkajian dan belajar untuk mendapatkan budaya partai. Pada tahap ini** sesungguhnya tahap awal dalam pembentukan gerakan, dengan terbetuknya *halqah pertama* setelah memahami konsep dan metode dakwah *hizb*. *Halqah pertama* itu kemudian menghubungi anggota-anggota masyarakat untuk menawarkan konsep dan metode dakwah *hizb*, secara individual. Siapa saja yang menerima *fikrah hizb* langsung diajak mengikuti pembinaan secara intensif dalam *halqah-halqah hizb* sampai mereka menyatu dengan ide-ide Islam dan hukum-hukumnya yang dipilih dan ditetapkan oleh *hizb*, sehingga mereka memiliki kepribadian Islam, yaitu mempunyai pola pikir yang Islami (*akliyah islamiyah*). Juga memiliki kepribadian yang Islami (*nafsiyah Islamiyah*), sehingga akan menjadikan kecenderungannya selalu mengikuti Islam, dan dalam menentukan langkah-langkahnya selalu sesuai dengan ajaran Islam. Sikap yang telah terbentuk akan melahirkan sikap rela kepada sesuatu yang diridai Allah dan Rasul-Nya, marah dan benci kepada hal-hal yang membuat Allah dan Rasul-Nya murka, lalu mereka akan tergugah mengemban dakwah ke tengah-tengah umat setelah mereka menyatu dengan Islam. Sebab pelajaran yang diterimanya dalam *halqah* merupakan pelajaran yang ber-

sifat *amaliyah* (praktis) dan berpengaruh (terhadap lingkungan), dengan tujuan untuk diterapkan dalam kehidupan dan dikembangkan di tengah-tengah umat.

Apabila seseorang telah sampai pada tingkatan ini, dialah yang akan mengharuskan dirinya bergabung dan menyatu menjadi bagian dari gerakan *hizb*. Demikianlah yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw pada tahap pertama dalam dakwahnya yang berlangsung selama tiga tahun. Pada saat itu Beliau menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat secara perorangan dengan menawarkan apa yang telah diturunkan Allah SWT kepadanya (berupa aqidah dan ide-ide Islam). Siapa saja yang menerima dan mengimani beliau berikut risalah yang dibawanya, maka ia akan bergabung dengan kelompok yang telah dibentuk Nabi Muhammad saw atas dasar Islam, secara rahasia. Beliau selalu menyampaikan bagian-bagian risalah, dan selalu membacakan ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau, sampai merasuk ke dalam diri mereka. Beliau menemui mereka secara sembunyi-sembunyi, mengajar mereka secara rahasia di tempat-tempat yang tidak diketahui masyarakat pada umumnya. Mereka melaksanakan ibadah juga secara diam-diam, sampai saatnya Islam dikenal dan menjadi pembicaraan masyarakat di Mekah, sebagian mereka bahkan masuk Islam secara berangsur-angsur.

Pada tahap pembentukan kader ini, *hizb* membatasi aktivitasnya hanya pada kegiatan pembinaan saja. *Hizb* lebih memusatkan perhatiannya untuk membentuk kerangka gerakan, memperbanyak anggota dan pendukung, membina mereka secara berkelompok dan intensif dalam *halqah-halqah hizb* dengan *aaqâfah* yang telah di-

<sup>30</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *al-Takattul al-Hizb*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2001), hlm. 36

tentukan sehingga berhasil membentuk satu kelompok partai yang terdiri dari orang-orang yang telah menyatu dengan Islam, menerima dan mengamalkan ide-ide *hizb*, serta telah berinteraksi dengan masyarakat dan mengembangkannya ke seluruh lapisan umat. Setelah *hizb* dapat membentuk kelompok partai sebagaimana yang dimaksud di atas, juga setelah masyarakat mulai merasakan kehadirannya, mengenal ide-ide dan cita-citanya, pada saat itu sampailah *hizb* ke tahap kedua.

2. *Marhalah kedua* adalah :

مرحلة التفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه , حتى يصبح المبداء عرفا ناتجا عن وعى , وتعتبره الجماعة كلها مبدأها حتى تدافع عنه جماعيا<sup>31</sup>

Maksudnya bahwa tahap interaksi dengan masyarakat tempat partai itu hidup, sehingga ideologi menjadi kebiasaan umum sebagai dari kesadaran masyarakat akan ideologi tersebut, sampai masyarakat menganggap bahwa ideologi partai adalah ideologi mereka, sehingga mereka bersedia membela bersama-sama.

Tahap kedua ini merupakan tahap berinteraksi dengan masyarakat, agar umat turut memikul kewajiban menerapkan Islam serta menjadikannya sebagai masalah utama dalam hidupnya. Caranya yaitu dengan menggugah kesadaran dan membentuk opini umum pada masyarakat terhadap ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditanam oleh *hizb*, sehingga mereka men-

jadikan ide-ide dan hukum-hukum tersebut sebagai pemikiran-pemikiran mereka, yang mereka perjuangkan di tengah-tengah kehidupan, dan mereka akan berjalan bersama-sama *hizb* dalam usahanya menegakkan *ad-daulah al-khilâfah*, mengangkat seorang *khalîfah* untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Pada tahap ini *hizb* mulai beralih menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara kolektif.

3. *Marhalah ketiga*, adalah:

مرحلة تسليم زمام الحكم عن طريق الأمة تسليما كاملا , حتى يتخذ الحكم طريقة لتطبيق المبدأ على الأمة<sup>32</sup>

Maksudnya adalah tahap menerima kekuasaan secara menyeluruh melalui dukungan umat, sehingga partai tersebut dapat menjadikan pemerintah menjadi metode untuk menerapkan ideologi atas umat. Kekuasaan sebagai puncak pencapaian tahapan pencerahan umat Islam untuk menegakkan syariat Islam. Menurut Muhammad Ismail Yusanto, juru bicara HTI, tahapan ketiga ini seperti penyerahan kekuasaan dari kaum Anshar kepada Rasulullah saw sewaktu tiba dari Mekah dalam perjalanan hijrahnya.

Berdasarkan strategi dakwah yang digunakan oleh HTI dengan meniru strategi Rasulullah saw, maka ada dua strategi besar yang dimainkan oleh HTI yakni kultural dan struktural atau politik.

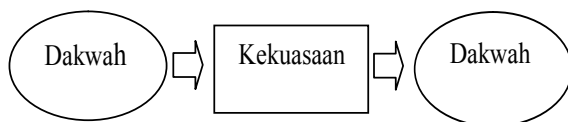
---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

### 1. Strategi Kultural

Strategi ini dilakukan HTI melalui dakwah dan jihad. Dua hal ini dilakukan untuk mempengaruhi dan melakukan transformasi pemahaman umat akan pentingnya tegaknya *khilâfah al-Islâmiyyah*. Ingat bahwa HTI adalah gerakan politik, sehingga semua yang dilakukan memiliki dimensi politik, termasuk dalam berdakwah juga mengandung dimensi potlitik. Wajarlah kalau logika yang dibangun oleh HTI, yakni melakukan proses-proses dakwah untuk meraih kekuasaan, setelah kekuasaan diraih juga untuk mengembangkan dakwah ke seluruh dunia, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Dakwah HTI untuk membangun kesadaran umat tentang kesempurnaan Islam, salah satunya bahwa politik tidak dapat dilepaskan dari ajaran Islam. Pentingnya dakwah ini dapat dilihat dalam salah satu kitab kajian HTI yakni *ad-daulah al-Islâmiyyah*,<sup>33</sup> terdapat 55 tema yang dibahas dapat dikelompokkan ke dalam dua tema besar, yakni tema dakwah, dan tema politik. Taqiuddin dalam bukunya ini sebelum membahas politik lebih dahulu membahas mengenai dakwah, ada 10 tema. Inilah logika yang dibangun oleh Taqiuddin yang kemudian diikuti oleh HT, bahwa sebelum membahas politik lebih dahulu harus dipahami tentang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah

saw baik sewaktu berada di Mekah maupun sesudah hijrah ke Madinah. Perjalanan sejarah dakwah Rasulullah saw berpuncak di Madinah yakni membangun negara Islam yang kuat. Untuk dapat kuat, maka bangunan spiritual, akidah dan keyakinan umat Islam harus kokoh, dan ini dibangun sewaktu di Mekah dengan memakan waktu selama 13 tahun. Setelah akidah atau moralitas umat telah kokoh, barulah membangun tata-politik, ekonomi dan sosial di Madinah. Negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah saw di Madinah yang begitu kuat memudahkan untuk melakukan futuhat, berdakwah kepada raja-raja atau kepala negara yang lain untuk memeluk agama Islam. Di sinilah pentingnya kekuasaan yang kuat, sehingga mudah untuk melakukan dakwah.

Dakwah dan politik bagi HTI merupakan dua sisi mata uang, artinya seperti dalam gambar di atas, HTI menggunakan dakwah untuk kepentingan politik, dan apabila kepentingan politik telah diperoleh, yakni kekuasaan telah berada dalam genggamannya, maka kekuasaan itu digunakan untuk melancarkan dakwah Islamiyah.

Dakwah dan politik diletakkan dalam posisi fungsionalis, bukan posisi struktural apalagi harus dihadapkan seolah-olah keduanya bagaikan air dan minyak. Dakwah dan politik dalam pandangan HTI adalah satu kesatuan yang integral, ini berdasarkan pemahaman bahwa agama dan negara atau politik itu memiliki hubungan integralistik formalistik (*din wa daulah*), ka-

<sup>33</sup> Taqiuddin an-Nabhani, *ad-Daulah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2002).

rena Islam diyakini agama yang sempurna, mengatur semua kehidupan manusia. Tidak ada satu pun dari sisi kehidupan manusia yang tidak dijelaskan aplikasinya dalam Islam, baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Untuk itulah dalam tataran aplikasi dua sayap, yakni sayap dakwah dan politik sering terjadi gesekan-gesekan, karena keduanya memiliki strategi yang berbeda. Dakwah ditujukan untuk melakukan perubahan atau transformasi sosial ke arah yang lebih baik, sedangkan politik ditujukan untuk memperoleh *power* atau kekuasaan.

Namun di tangan HTI, dakwah dijadikan media untuk meraih kekuasaan, maka tahap awal terbentuklah *kutlah-kutlah*. Tujuan *kutlah* adalah melanjutkan kembali kehidupan Islam di negara Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Setiap *kutlah* mempelajari dan memahami Islam agar terwujud *aqliyah* dan *nafsiyah* yang Islami, sehingga terbentuk *syakhshiyah Islamiyah*.<sup>34</sup> *Kutlah* atau kelompok pada esensinya adalah aktivitas politik.

Dua sayap dakwah dan politik juga dimiliki oleh *tarbiyyah* yang kemudian dijadikan ideologi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tertera dalam pernyataan bahwa "salah satu fikrah dakwah kita adalah bersifat *siyasi*, sehingga seorang muslim harus ber-*siyasi* (bersiasat) untuk memperoleh kemenangan. Penerapan siasat dalam konteks kontemporer, seorang muslim harus dapat memilih partai atau jamaah yang sesuai

dengan ajaran Islam dan sesuai dengan fikrahnya. Untuk itu kemampuan membandingkan antarpolisi Islam dengan obyektif sangat penting, sehingga keikutsertaannya bukan taklid atau hanya mengekor".<sup>35</sup> Ini berarti dakwah menjadi media untuk memperoleh anggota sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya diharapkan untuk memilih partai politik, sehingga dakwah diorientasikan untuk memperoleh kekuasaan. Hanya saja PKS telah menjadi partai politik yang mengikuti pemilu dan memiliki wakilnya duduk di parlemen, bahkan kader terbaiknya telah menduduki di lembaga eksekutif, baik menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan II, maupun menjadi gubernur/wakil dan walikota-bupati/wakilnya. PKS masuk dalam sistem politik Indonesia, sementara HTI masih berada di luar sistem, sehingga peran politiknya belum dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun demikian, HTI dan PKS dalam penelitian yang dilakukan oleh Irwan Omar, sama-sama gagal melawan hegemoni pemerintah Indonesia.<sup>36</sup>

Dakwah HTI untuk dapat mempengaruhi umat mengikuti *fikrah* dan *tharîqah*-nya antara lain dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: (1) Majalah *Al-Wa'ie*, merupakan majalah yang terbit sebulan sekali dengan nama lengkap "Media Politik & Dakwah *Al-Wa'ie* Membangun Kesadaran Umat". (2) Tabloid Media Umat Memperjuangkan Kehidupan Islam, ini terbit setiap bulan dua kali. (3) Bulletin mingguan yang diberi nama "Al-Islam". Buletin ini terbit reguler setiap minggu, di

<sup>34</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbu al-Tahrir*, ([t.t.] : Hizbut Tahrir, 2001), hlm. 77-78.

<sup>35</sup>Lihat, Muhammad Syadid, *Manhaj Tarbiyah: Metode Pembinaan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Rabbani Press, 2003), hlm. 205-206.

<sup>36</sup> Irwan Omar, *Kegagalan HTI dan PKS Sebagai Gerakan Counter Hegemoni*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2009).

distribusikan oleh para aktivis HTI terutama pada hari Jum'at di masjid-masjid, dan setiap terbit dicetak sebanyak 1.000.000 (1 juta) eksemplar. Penerbitan buletin "Al-Islam" menurut K.H. Muhammad Al Khaththath, Pimpinan DPP HTI, bahwa penerbitan "Al Islam" memiliki dua maksud, yakni *pertama*, dalam rangka membuka wawasan dan membangun kesadaran umat Islam untuk kembali merengkuh Islam dalam aspek ruhiyah dan *siyasiyah*. *Kedua*, membantu memberikan pemahaman dan keikhlasan berkorban untuk kembali melanjutkan kehidupan Islam dalam naungan *daulah khilâfah al-Islâmiyyah*.<sup>37</sup> Judul dalam buletin, misalnya terbitan tahun 2004, merupakan respon dari problem dan isu-isu nasional yang sedang aktual, yang dapat dipetakan dalam beberapa tema, baik tema politik, ekonomi, budaya, dan tema tentang dakwah-jihad, sebagaimana contoh dalam tabel 1.

Judul-judul dalam bulletin Al-Islam di atas menunjukkan konsistensi HTI dalam memperjuangkan tegaknya *khilâfah al-Islâmiyyah*, dan menurutnya *khilâfah* merupakan satu-satunya solusi dari berbagai macam persoalan kebangsaan. (4) d. *Website* dengan alamat <http://hizbut-tahrir.or.id>. Dalam situs resmi HTI ini terdapat beberapa hal yang mudah diakses dan di-download, baik tentang berita, pernyataan resmi organisasi dan artikel tentang HTI itu sendiri. Bahkan buku-buku HT dengan mudah dapat diperoleh tanpa membayar. (5) Pengajian dan khutbah juga sebagai media yang efektif untuk mempengaruhi umat Islam. Pimpinan, kader dan aktivis HTI disebar untuk aktif memberikan pengajian dan sebagai khotib di masjid-masjid di seluruh Indonesia. (6) Radio & video

streaming, juga dijadikan media dakwah yang efektif, karena memiliki jangkauan yang luas. (7) Kajian-kajian, untuk mensosialisasikan *khilâfah al-Islâmiyyah* dan sikap, solusi dan gagasan yang ditawarkan oleh HTI tidak hanya dengan demonstrasi yang dihadiri oleh aktivis dan simpatisan yang jumlahnya ribuan, ditambah orasi atau pernyataan sikap yang disampaikan oleh Pimpinan HTI. Kajian intensif yang dikemas dalam bentuk halaqah Islam dan peradaban juga menjadi media, mengingat yang menjadi sasaran adalah orang-orang terdidik, misalnya mahasiswa, pelajar, dosen, guru, dan tokoh Islam. Adapun tema yang diangkat dalam halaqah tetap berkisar tentang *khilâfah al-Islâmiyyah* sebagai satu-satunya sistem untuk menjadi solusi dari berbagai problem keumatan dan kebangsaan, dan problem-problem yang sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia, misalnya tentang kenaikan harga BBM, sekularisme, kapitalisme, penegakan syariat Islam, Bank Century, dan tentang Obama, pembagian kondom gratis.

Dakwah menurut HTI ada tiga macam, yakni *pertama*, dakwah *fikriyah*, dakwah melalui penyebaran pemikiran untuk menanamkan pemikiran Islam dan menghancurkan atau membantah pemikiran yang tidak Islami. *Kedua*, dakwah *siyasiyah*, dakwah yang digerakkan untuk tercapainya tujuan politik yakni tegaknya syariat dan *khilâfah*. *Ketiga*, dakwah *askariyyah*, dakwah melalui kekuatan militer atau jihad *fi sabilillâh*. HTI sekarang sedang melakukan dakwah *fikriyyah* dan *siyasiyyah* sekaligus melalui berbagai *uslub* (cara) dan *wasâlah* (sarana), baik secara langsung maupun tidak langsung. Dakwah secara langsung di antaranya seperti yang dilakukan

<sup>37</sup> Muhammad Al Khaththath, "Kata Pengantar", dalam *Bundel Buletin Dakwah Al-Islam Melanjutkan Kehidupan Islam Tahun I*, (Bogor: Yasmin Press, 2004), hlm.iii.

**Tabel 1. Tema dan Judul Buletin Al-Islam**

Tema	Judul
Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hijrah menuju Khilafah Islamiyah</li> <li>2. Khilafah Solusi Problematika Umat Menyambut Konferensi Khilafah Islamiyah, Senayan.</li> <li>3. Syaret Islam Islam Langgeng dan Konstan</li> <li>4. Hanya Sekedar Mengganti Menteri</li> <li>5. Jangan Lepaskan Papua</li> <li>6. Kontroversi Amandemen Pasal 29 UUD '45</li> <li>7. Sudahkah Kita Benar-benar Merdeka?</li> <li>8. Islam dan Negara Tak Bisa Dipisahkan</li> <li>9. Konspirasi Kafir Barat Menyerang Umat Islam</li> <li>10. Antara Atambua dan Palestina: Ketidakadilan Dunia</li> <li>11. Memundurkan Gus Dur ataukah Memundurkan Demokrasi.</li> <li>12. Aceh Kemana Menuju?</li> <li>13. Ramadhan, Momentum Penerapan Islam Kaffah</li> <li>14. Harga Mahal Demokratisasi</li> <li>15. Demokrasi Mengharuskan Sekularisasi Kehidupan</li> <li>16. Pilar-Pilar Negara Sudah Runtuh.</li> <li>17. Mewasdai Manuver Amerika Serikat.</li> <li>18. Berlepas Diri dari Sistem Kufur</li> <li>19. Jangan Teruskan Penyimpangan Negara</li> <li>20. Perbedaan Akhir Ramadhan: Sebuah Persoalan Politik</li> <li>21. Politik: Rekayasa dan Amar Makruf Nahi Munkar</li> </ol>
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di Balik Jerat Hutang IMF</li> <li>2. Negara OPEC kok Impor BBM?</li> <li>3. Strategi Amerika Untuk Menguasai Ekonomi Dunia</li> <li>4. Mencermati Kenaikan BBM</li> <li>5. Hentikan Utang Luar Negeri</li> <li>6. Pemenuhan Kebutuhan Pokok, Tanggung Jawa siapa?</li> </ol>
Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quo Vadis Pendidikan Indonesia</li> <li>2. Bahaya Kekufuran di Balik Jubah Islam</li> <li>3. Di Balik Fenomena Anarkisme Massal</li> <li>4. Menyoal Budaya Lokal dan Asing.</li> <li>5. Sekularisme: Pemasungan Ajaran Islam</li> <li>6. Fanastisme Kesukuan Awal Kehancuran Masyarakat</li> <li>7. Jangan Mudah Diadu Domba</li> </ol>
Dakwah dan Jihad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umat Islam, Jihad, Bukan Kejahatan</li> <li>2. Menyikapi Kristenisasi di Dunia Islam</li> <li>3. Muslim Tertindas, Islam Jawabannya</li> <li>4. Gempa, Sebuah Renungan</li> <li>5. Kobarkan Jihad</li> <li>6. Jihad dan Dahwa di Bulan Ramadhan</li> <li>7. Ukhuwah Islamiyah</li> <li>8. Menghalalkan Segala Cara, Haram !</li> </ol>

Sumber: Diolah dari Hizbut Tahrir Indonesia, *Bundel Buletin Dakwah Al-Islam Melanjutkan Kehidupan Islam Tahun I*, (Bogor: Yasmin Press, 2004).

HTI melalui forum-forum publik seperti seminar, diskusi, *talkshow*, tabligh akbar, khutbah Jum'at, pengajian-pengajian dan lain sebagainya yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam satu minggu dilakukan puluhan bahkan mungkin ratusan forum-forum semacam itu.

## 2. Strategi Politik

Salah satu strategi politik yang diusahakan oleh HTI untuk menegakkan *khilâfah al-Islâmiyyah* adalah dengan demonstrasi, sebagai media untuk membentuk opini publik, dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan politik, ekonomi, dan kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak. Demonstrasi selain sebagai media untuk memobilisasi massa dalam merespon setiap persoalan keummatan dan kebangsaan, juga menjadi salah satu cara yang mudah untuk mempengaruhi massa dan menciptakan nalar publik sesuai dengan yang diperjuangkan. Selain itu demonstrasi dengan mengerahkan massa dalam rangka menunjukkan eksistensinya sebagai gerakan yang sigap, cepat, dan tanggap atas problema yang sedang dihadapi oleh umat dan bangsa.

Demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, baik protes itu ditujukan kepada seseorang maupun kelompok atau pemerintahan. Selain itu demonstrasi juga biasa disebut dengan istilah unjuk rasa. Namanya saja unjuk rasa, maka yang dilakukan adalah memperlihatkan atau menunjukkan dalam bentuk pikiran, sikap dan tindakan apa-apa yang selama ini dirasakan. Kata protes dalam pengertian ini menjadi kata kunci

dari demonstrasi. HTI dalam setiap melakukan demonstrasi jauh dari tindakan anarkhis, sehingga ada nilai kemanfaatan atau sisi positifnya. Menurut Muhammad Ismail Yusanto, HTI dapat menyelenggarakan aksi damai itu sudah merupakan hasil. Mereka datang bukan karena dibayar dan memang tidak pernah dibayar. Justru malah mereka mengeluarkan uang untuk datang ke tempat demonstrasi. Sampai-sampai ada tokoh politik di Indonesia yang mengatakan bahwa yang bisa melakukan hal yang seperti itu hanyalah HTI, parpol yang lain tidak akan bisa kecuali harus mengeluarkan uang.<sup>38</sup> Aksi itu sendiri pun sebenarnya adalah hasil. Secara internal buat peserta aksi, mereka akan semakin yakin bahwa gagasan syariat dan *khilâfah* itu terus semakin mendapatkan dukungan. Apalagi ketika mereka melihat bahwa perjuangan ini merupakan murni untuk Islam karena memang tidak ada tendensi politik praktis sama sekali. Karena memang HTI dikenal sebagai parpol yang tidak ikut dalam perebutan kursi di parlemen atau di pemerintahan. Lebih lanjut Muhammad Ismail Yusanto menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HTI memunculkan kesadaran politik dan semangat perjuangan. Artinya bahwa ketika demo itu semakin hari semakin besar, maka akan memunculkan kekuatan masa yang masif, yang diperkirakan cepat atau lambat orang tidak bisa mengabaikan begitu saja, karena ekspresi dari aspirasi masyarakat itu, diantaranya dalam konteks kehidupan sekarang ini tercermin dari seberapa besar masyarakat itu terlibat di dalam demonstrasi, semakin besar jumlah umat yang mengikuti demonstrasi, menunjukkan semakin berarti besar pula aspirasi masyarakat.<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Jubir HTI, "Wacana Penting Untuk Perubahan dan Tegaknya Khilafah", dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/category/hizbut-tahrir/page/2/>

<sup>39</sup> *Ibid.*



Setiap ada problem aktual yang dihadapi oleh umat dan bangsa, misalkan kasus Bank Century, HTI selalu tampil menyuarakan apa yang selama ini diperjuangkan. Kasus Bank Century adalah permainan kapitalis, dan kasus ini tidak akan muncul dalam sistem ekonomi Islam di bawah *khilâfah al-Islâmiyyah*. Strategi yang digunakan HTI adalah dengan melakukan demonstrasi yang diselenggarakan di kota-kota besar, mengerahkan massa dengan membawa atribut berupa bendera, spanduk dan selebaran, sebagaimana Sekitar 10.000 massa HTI melakukan aksi unjuk rasa damai menunjukkan sikap mereka terkait skandal Bank Century, Ahad (6/12/2009) pagi di Jakarta. Tema demonstrasinya adalah “*Bersihkan Indonesia dari Sistem dan Rezim Korup*”.

## PENUTUP

Hizbut Tahrir (HT) datang ke Indonesia pada waktu yang tepat dengan situasi dan suasana batin sebagian umat Islam yang sedang menghadapi tindakan represif Orde Baru, dan menemukan momentum gerakan yang tepat pula pada era reformasi. Militansi kader dan aktifis HTI sebagai daya dukung dalam menyebarkan ide-ide tegaknya Khilafah Islamiyah di seantero daerah di wilayah Indonesia, se-

hingga dalam waktu yang cepat telah terbentuk kepengurusan di seluruh Indonesia.

Dakwah yang dikemas oleh HTI adalah dakwah politik, maka semua buku Taqiyuddin an-Nabhani sebagai rujukan materi dakwah, baik melalui majalah, tabloid, bulletin, pengajian umum, khutbah jum'ah, radio, live streaming, kajian-kajian halqah, diskusi, seminar dan berbagai macam pelatihan.

Strategi dakwahnya melalui kultural dan struktural atau politik, inilah yang membedakan dengan strategi dakwah organisasi massa Islam lainnya. Hanya saja, strategi politik masih berkisar pembentukan opini publik melalui demonstrasi penggerakan massa, belum berani tampil menjadi partai politik ideologis yang resmi diakui oleh pemerintah. Aspirasi politik HTI masih menyebar ke semua partai politik, karena tidak ada instruksi dari DPP HTI nuntut menyalurkan ke salah satu partai politik peserta pemilihan umum.

Gesekan-gesekan dakwah HTI dengan gerakan Islam lain belum begitu kelihatan ke permukaan, walaupun sesungguhnya HTI sering memanfaatkan fasilitas-fasilitas milik umat Islam dan milik umum untuk mensosialisasikan ide-ide perjuangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khaththath, Muhammad.2004. “Kata Pengantar”, dalam *Bundel Buletin Dakwah Al-Islam Melanjutkan Kehidupan Islam Tahun I* . Bogor: Yasmin Press.
- Al-Khalidi, M.Abdul Majid. 2004. *Analisis Dialektik Kaidah Pokok Sistem Pemerintah Islam*, terj. Harits Abu Ulya. Bogor: Al-Azhar Press.
- A.N. Feriawan. 2004. FSLDK Berhenti Berharap?, dalam *Special Report, Digital Journal Al-Manar*, Edisi 1.

- Amal, dan Syamsul Rizal Penggabean, Taufik Adnan. 2004. *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Alvabet.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Al-Takattul al-Hizb*. Beirut: Dar al-Ummah.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Ad-Daulah al-Islâmiyyah*. Beirut: Dar al-Ummah.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Mafahim Hizbu al-Tahrir* ([t.t.] : Hizbut Tahrir.
- Anonim. 2009. *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Abu Afif dan Nur Khalish. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Khilafah dan Jejak Islam Kesultanan Islam Nusantara*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Baran, Zeyno (ed.) 2004. *The Challenge of Hizbut Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology, Conference Report* ([t.t]: The Nixon Center.
- Brower, Anthony. 2000. *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, terj.:Joebaar Ajoeb. Jakarta: TePLOK Press.
- Elai, dan Constantine P Danopoulos, Khandakar. 2004. "Democracy, Capitalism and Development", dalam *Journal of Security Sector Management*, Volume 2 Number 2- June.
- <http://www.hizbut-tahrir.or.id>
- Narwoko, dan Bagong Suyanto, J. Dwi (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Omar, Irwan. 2009. *Kegagalan HTI dan PKS Sebagai Gerakan Counter Hegemoni*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Ritzer, dan Douglas J. Goodman, George. 2008. *Terori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rodhi, Muhammad Muhsin. *Tsaqafah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, terj. Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa. Bangil: Al-Izzah.
- Sabili*, No.9 Th. X, 2003. Edisi Khusus Sejarah Emas Muslim Indonesia.
- Syadid, Muhammad. *Manhaj Tarbiyah: Metode Pembinaan dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Rabbani Press.
- Tahrir, Syabab Hizbut. 2008. *Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah*, terj.: M.Ramdhan Adi. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Tahrir, Hizbut. 2009. *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah

Zallum, Abdul Qadim. 2009. *Demokrasi Sistem Kufur*, terj. M. Shiddiq al-Jawi. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Za'rur, Abu. 2009. *Seputar Gerakan Islam*, terj. Yahya Abdurrahman. Bogor: Al-Azhar Press.